



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari No 52, 85111 ☎ (0380) 833114 Laman : biroekonomidanapnttprov.com/
K U P A N G

Kupang, 12 Maret 2025

Nomor : 500.12.1/255/EK1.1
Sifat : Penting
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT
di -
Kupang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional *website* Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengajukan 3 (tiga) orang sebagai *Person In Charge* (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Meysiliani Sidi Bata, S.Kom
NIP : 19970214 202202 2 001
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ IIIa
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
No. HP : 081238349542
2. Nama : Lingkan Ruru Tanan, S.Kom
NIP : 199607152022022001
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ IIIa
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
No. HP : +62 813-3710-5600
3. Nama : Yohana Fransisca, S.Kom
NIP : 198806062020122006
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ IIIa
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
No. HP : +62 822-3622-6606

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197004271990031005

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV NTT
TAHUN 2025

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA										
a	Informasi Badan Publik									
1	Profil Biro	Memuat informasi Profil, Visi, Misi, Tupoksi Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Alamat Biro	Memuat daftar alamat dan kantor Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Tugas dan Fungsi Biro	Berisi sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Struktur Organisasi	Susunan organisasi Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak	Kondisi jumlah pegawai dan tenaga kontrak di lingkup Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
6	Rekap Kepangkatan (DUK) Pegawai	(1) Data-data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (2) Informasi Struktur PNS (3) Data Pejabat Struktural	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
b	Informasi Ringkasan Program/Kegiatan									
1	Nama Program dan Kegiatan	Ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tahun 2025	Anggaran Kegiatan Biro Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Hardcopy	Selama berlaku
3	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Informasi yg memuat Program Kerja tahun 2024 yg bersumber baik dari APBD dan APBN	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025	(1) Rencana Anggaran dan Pendapatan (2) Rincian Belanja Tidak langsung SKPD (3) Rincian Belanja Langsung SKPD (4) Rincian Belanja Langsung Program	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Biro PAP Tahun 2025	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
c	Ringkasan Informasi Kinerja									
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Biro PAP Tahun 2024	Informasi terkait capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
d	Ringkasan Laporan Keuangan									
1	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024	Informasi mengenai pencapaian program kegiatan baik secara fisik di lapangan dan neraca keuangan masing-masing program atau kegiatan tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Inventaris dan Aset Biro Tahun 2024	Laporan Inventaris dan Aset Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
e	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik									
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik di Badan Publik	Informasi terkait data statistik dan permintaan data yg tersedia dan tidak tersedia di Badan publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan PPID Tahun 2024	Laporan evaluasi pelaksanaan PPID Biro tahun 2023	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
f	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi									
1	Standar Prosedur Operasional (SOP) Memperoleh Informasi	Informasi tentang tata cara memperoleh informasi di Badan Publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			√	Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Standar Prosedur Operasional (SOP) Pengajuan Keberatan	Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan informasi di Badan Publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			√	Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
g	Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini									
1	Jalur Evakuasi	Informasi terkait bagan jalur evakuasi di Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			√	Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy	Selama berlaku
INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SETIAP SAAT										
a	Informasi tentang peraturan, Surat Keputusan Kepala Biro dan kerjasama dengan pihak ketiga									
1	SK Gubernur Nomor: 24/KEP/HK/2025	Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2025	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
2	SK Gubernur Nomor: 75/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
3	SK Gubernur Nomor: 263/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Percepatan Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
4	SK Gubernur Nomor: 377/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutis Periode 2021-2023	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
5	SK Gubernur Nomor: 123/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
6	SK Gubernur Nomor: 219/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
7	SK Gubernur Nomor: 59/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
8	SK Gubernur Nomor: 80/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
9	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Madu Mutis	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
10	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 117 Tahun 2022	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Pengembangan Jambu Mete	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
11	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Pengembangan Bambu	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
12	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019	Peraturan Daerah Tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroada)	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
13	SK Gubernur Nomor: 3/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Periode Tahun 2019-2023	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
14	SK Gubernur Nomor : 416/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan Dereksi perseroan terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2019-2024	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
15	SK Gubernur Nomor : 392/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Panitia Pelaksana Seleksi Calon Komisaris Dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
16	SK Gubernur Nomor : 354/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran Dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
17	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
18	SK Gubernur Nomor : 153/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
19	SK Gubernur Nomor: 134/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
20	SK Gubernur Nomor: 54/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
21	SK Gubernur Nomor: 61/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
22	SK Gubernur Nomor: 194/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
23	SK Gubernur Nomor: 112/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran Batas Dan Penyelesaian Masalah Tanah Kawasan Industri Bolok Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
24	SK Gubernur Nomor: 289/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Johannes Agustinus Mboeik Dari Jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2023-2027 dan Pengangkatan Saudari Dra. Flouri Rita Wuisan, MM Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2024-2028	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
25	SK Gubernur Nomor: 290/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Dr. Frits Oscar Faggidae, M.Si, MEP Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2024-2028	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
26	SK Gubernur Nomor : 23/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Independen Uji Kelayakan Dan Kepatan Calon Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Flobamor	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
27	SK Gubernur Nomor : 34/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Independen Uji Kelayakan Dan Kepatan Calon Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Flobamor	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
28	SK Gubernur Nomor: 291A/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Gedung Eks Hotel Sasando Timor Internasional	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
29	SK Gubernur Nomor: 150/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
30	SK Gubernur Nomor : 293/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pelaksana Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo Dan Sekitarnya Dan Labuan Bajo Dan Sekitarnya	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
31	SK Gubernur Nomor: 227/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Lokasi Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
32	SK Gubernur Nomor : 249/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemasok Beras jatah bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
33	SK Gubernur Nomor : 425/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakukan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Di Taman Nasional Komodo	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
34	SK Gubernur Nomor: 138/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 227/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Lokasi Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
35	SK Gubernur Nomor : 430/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakukan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
36	SK Gubernur Nomor : 151/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 249/KEP/HK/2023 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemasok Beras Jatah Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
37	SK Gubernur Nomor : 306A/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2020 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
38	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PERSERODA)	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
39	SK Gubernur Nomor : 256/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Rancangan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
40	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 1999	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
41	SK Gubernur Nomor 54/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
42	SK Gubernur Nomor : 256/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Rancangan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
43	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2022	Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
44	SK Gubernur Nomor : 446/KEP/HK/2024	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 446/KEP/HK/2024 tentang Besaran Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
45	SK Gubernur Nomor : 22/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
46	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2023	Peraturan Gubernur Tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
b Seluruh Informasi Lengkap Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 11										
1	Selayang Pandang Biro Perekonomian dan AP	Informasi mengenai gambaran singkat Perekonomian Nusa Tenggara Timur dalam mendukung Pembangunan Bidang Perekonomian di NTT Tahun 2023	Bagian Kebijakan Perekonomian dan SDA	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		√		Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan Triwulan Kinerja TPID	Informasi mengenai gambaran perkembangan inflasi Provinsi NTT serta evaluasi dan rekomendasi kebijakan	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Laporan Kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID	Informasi mengenai upaya konkrit pengendalian inflasi menjelang hari raya	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Data Penyaluran KUR dan UMI	Informasi mengenai penyaluran KUR UMI berdasarkan sektor, skema dan wilayah	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Data Kuota BBM Bersubsidi	Informasi terkait rincian kuota volume BBM bagi Kab/Kota se Provinsi NTT	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
6	Data Sentra Pengembangan HHBK	Informasi mengenai produksi HHBK di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
7	Data Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Informasi mengenai potensi dan pemanfaatan SDA antara lain: hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, batu bara dan logam di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
8	Data Potensi dan Pemanfaatan EBT	Informasi terkait potensi dan pemanfaatan EBT di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
9	Data Profil BUMD dan BLUD Provinsi NTT	Informasi terkait BUMD dan BLUD dibawah binaan pemerintah Provinsi NTT	Bagian BUMD & BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
10	Data Pengelolaan BUMD dan BLUD Provinsi NTT	Informasi terkait pengelolaan terhadap kinerja BUMD dan BLUD	Bagian BUMD & BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
11	Laporan Tahunan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Informasi tentang aspek kelembagaan, aspek permodalan dan keuangan, aspek usaha/bisnis, aspek pelayanan dan jejaring kemitraan BUMD	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
12	Laporan Tahunan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	Informasi tentang aspek kelembagaan, aspek permodalan dan keuangan, aspek usaha/bisnis, aspek pelayanan dan jejaring kemitraan BLUD	Subbag BLUD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
13	Data Penetapan Batas Atas Batas Bawah Pengelolaan Air Minum	Informasi terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum	Subbag BUMD	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	√			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
14	Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Informasi terkait realisasi APBD dari Kab/Kota yang meliputi data pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta realisasi APBD dari Kab/Kota	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
15	Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Informasi terkait realisasi APBD dan APBN dari setiap OPD Provinsi yang meliputi data pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
16	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Informasi terkait data realisasi belanja dan pendapatan yang bersumber dari APBD	Subbag Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan										
1	Data Jumlah pegawai per jabatan per golongan (DUK)	Informasi terkait pegawai perjabatan dan penggolongan Biro PAP berdasarkan daftar urutan kepangkatan	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Rekapitulasi pembayaran tunjangan prestasi kerja sesuai kinerja pegawai	Informasi terkait pembayaran TPP berdasarkan kinerja pegawai	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Profil pejabat dan pegawai Badan Publik	Informasi terkait profil pejabat dan pegawai Badan publik	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
d Data perbendaharaan atau inventaris										
1	Laporan Inventaris dan Asset Biro PAP tahun 2024	Laporan Inventaris dan Asset Biro	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin	Laporan Inventaris dan Asset Biro	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
e Rencana strategis dan rencana kerja										
1	Rencana Strategis (Renstra) Biro PAP Tahun 2025	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perekonomian dan AP, 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Biro PAP Tahun 2024	Informasi terkait capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Biro	Subbag Tata Usaha	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro PAP, Tahun 2025	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku



Pt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina TK. I
NIP. 19700427 199003 1 005

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV NTT
TAHUN 2025

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan : - SPJ berikut lampirannya, - Dokumen anggaran - Surat pencairan anggaran. b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
2	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
3	Daftar User dan Password Aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); 4. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan	1. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang; 2. Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	1. Melindungi data pribadi; 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data
4	Surat-surat/memo/memorandum/ nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Menghindari kesalahangunaan terhadap infomasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
6	Data hasil evaluasi kinerja ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
7	Data rencana penempatan ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	1. Proses penyusunan kebijakan tidak terganggu
8	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Proses penyusunan kebijakan/kesuksesan kebijakan tidak terganggu

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
9	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	SK pengangkatan, pengangkatan, pemindahan pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11	Keputusan Keputusan Penjatuhan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat mengungkap mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Membantu kelancaran proses penegakan hukum 2. Melindungi Melindungi rahasia rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia
13	Daftar Nilai SKP ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
15	Kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
16	Laporan Realiasi Anggaran	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
17	Catatan Atas Laporan Keuangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara
18	Data Dewan komisaris dan Direksi BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi Dewan komisaris dan Direksi BUMD	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
19	Laporan Keuangan BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
20	Laporan Hasil RUPS BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses peengambilan kebijakan oleh pemerintah
21	Laporan Penyertaan Modal BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses peengambilan kebijakan oleh pemerintah

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
20	Laporan Hasil RUPS BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah
21	Laporan Penyertaan Modal BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah
22	Laporan Kinerja BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
23	Tingkat Kesehatan BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan



Pt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.

Pembina Tk. I

NPA 19700427 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833114 Laman : biroekonomidanapnttprov.com/
K U P A N G

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.1/246/EK1.1

Pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-03-2025) bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan : - SPJ berikut lampirannya, - Dokumen anggaran - Surat pencairan anggaran. b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
2	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
3	Daftar User dan Password Aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); 4. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan	1. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang; 2. Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	1. Melindungi data pribadi; 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
4	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Menghindari kesalahan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
6	Data hasil evaluasi kinerja ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
7	Data rencana penempatan ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	1. Proses penyusunan kebijakan tidak terganggu
8	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Proses penyusunan kebijakan/kesuksesan kebijakan tidak terganggu

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
9	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	SK pengangkatan, pengangkatan, pemindahan pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11	Keputusan Keputusan Penjatuhan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat mengungkap mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Membantu kelancaran proses penegakan hukum 2. Melindungi Melindungi rahasia rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia
13	Daftar Nilai SKP ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Selama masih berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
		Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.			
14	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
15	Kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
16	Laporan Realisasi Anggaran	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
17	Catatan Atas Laporan Keuangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara
18	Data Dewan Komisaris dan Direksi BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi Dewan komisaris dan Direksi BUMD	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
19	Laporan Keuangan BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
20	Laporan Hasil RUPS BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah
21	Laporan Penyertaan Modal BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah
22	Laporan Kinerja BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
23	Tingkat Kesehatan BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
24	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan
25	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Terbatas sampai setelah selesai diaudit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs. Alexander B. Koroh, MPM. / 19700427 199003 1 005	Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	
2	Meriyana, S.Sos / 19730506 199312 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	

No	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
3	Ernes D. Hamel, S.Pi., M.Si. / 19691027 199903 1 003	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT,



Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197004271990031005